

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM PEMERINTAH TERHADAP PENGAIRAN AIR TANAH DI DESA BINA BARU KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Naidah

naidah@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini sebanyak 35 orang, dan sampel total yaitu berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Kuisisioner, dan (4) Studi Pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 70 % kategori baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu faktor Komunikasi 72 %, sumber daya 68 %, struktur birokrasi 70 %, disposisi pelaksana 67 %, dengan capaian 69,25 % kategori baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas dan Pengairan Air

Abstract

The purpose of the study is to find out how the accountability of government program management for groundwater irrigation is in the village of Bina Baru, Kulo district, Sidenreng Rappang district and to find out what factors affect the accountability of government program management for groundwater irrigation in Bina Baru village, Kulo district, Sidenreng Rappang district. The population of this study was 35 people, and the total sample was 35 people. The data collection techniques used in this study were (1) observation, (2) interviews, (3) questionnaires, and (4) literature studies. The collected data was then analyzed using frequency and percentage tables. The results of this study indicate that the Accountability of Government Program Management for Groundwater Irrigation in Bina Baru Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency with a value of 70% good category. The factors that influence the Accountability of Government Program Management on Groundwater Irrigation in Bina Baru Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency, namely Communication factors 72%, resources 68%, bureaucratic structure 70%, disposition of implementers 67%, with achievements 69.25% category good.

Keywords: Accountability and Water Irrigation

A. PENDAHULUAN

Air menyelimuti kurang lebih 2/3 bagian bumi, dan hanya 1/3 bagian dari planet ini yang muncul sebagai daratan kering. Total jumlah kandungan air di bumi hampir 326 juta kubik mil, menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat Sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air, tetapi 97% air tersebut asin dan tidak baik untuk diminum. Diantara 70% air minum tersebut berbentuk es, kurang dari 1% air minum yang ada di dunia siap dimanfaatkan secara langsung. Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai lebih dari 200 juta, akan mengakibatkan kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia memiliki 6% potensi air dunia atau 21% potensi air di Asia Pasifik. (Pikiran Rakyat, 22 Maret 2005). Salah satu potensi air itu adalah air tanah yang berbentuk mata air alami (water spring).

Air permukaan sampai saat ini menjadi andalan untuk penyediaan air irigasi, namun tidak semua daerah yang memiliki lahan pertanian dapat dilayani oleh irigasi teknis yang bersumber dari air permukaan tersebut. Dunia dihadapkan pada permasalahan pasokan air terutama kuantitas dan kualitas air tanah. Hasil penelitian Brown dan Haiwel (1998) di Provinsi Shandong, Cina, menunjukkan telah terjadi penurunan dalam penyediaan air irigasi di Cina sehingga menyebabkan peningkatan ancaman terhadap keamanan pangan. Cina tergantung pada lahan sawah irigasi air tanah untuk memproduksi 70% sereal (biji-bijian) bagi 1,2 miliar orang. Artinya, ratusan juta orang di Cina bergantung pada air tanah. Suripin (2004) mengemukakan bahwa ketergantungan terhadap penggunaan air bersih dari air tanah telah mencapai lebih dari 70% di berbagai daerah di Indonesia. Penggunaan air tanah tersebut tidak hanya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari seperti makan, minum dan mandi namun juga untuk keperluan pertanian. Sutawan (2001) menjelaskan bahwa telah terjadi krisis air tanah di beberapa provinsi di Indonesia.

Beberapa wilayah sangat mengandalkan air tanah untuk pengairan usaha pertanian. Terbatasnya sumberdaya air tanah untuk irigasi pertanian seringkali memunculkan konflik kepentingan yang diakibatkan oleh persaingan dalam penggunaan air antara berbagai pengguna,

alih fungsi lahan, hak penggunaan air yang tidak jelas, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kelemahan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air. Pandangan ini mengindikasikan bahwa permasalahan ketersediaan air tanah tidak hanya dalam perspektif mekanis saja namun merupakan satu kesatuan utuh dalam multi aspek, antara lain aspek politik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Air merupakan sumberdaya yang sangat esensial bagi kehidupan umat manusia. Ketersediaan sumberdaya air di bumi tidak merata, dinamis dari waktu ke waktu, dan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara disisi lain pertumbuhan populasi manusia semakin besar dengan tuntutan urbanisasi dan industrialisasi yang semakin meluas berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya air. Ketimpangan antara tingkat kebutuhan dan keterdapatannya sumberdaya air akan mengakibatkan adanya krisis air. Peningkatan kebutuhan atau Demand air secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Air untuk kebutuhan konsumsi domestik atau rumah tangga misalnya untuk mandi, mencuci, memasak, dan untuk minum.
2. Air untuk keperluan pengairan lahan pertanian misalnya untuk irigasi, mengairi sawah, perikanan, dan usaha tani lainnya.
3. Air untuk kegiatan industry misalnya untuk pembangkit listrik, proses produksi, transportasi, dan kegiatan yang lainnya.

Pemanfaatan air tanah yang mempertimbangkan kesesuaian daya dukung lapisan tanah pembawa air setempat yang penggunaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 memuat Peraturan Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi. Kebijakan-kebijakan tersebut memuat tata kelola air tanah, hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air tanah serta upaya konservasi air tanah. Penyerahan kewenangan hak kelola irigasi dari pemerintah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip partisipasi masyarakat secara aktif. Perkembangan suatu daerah sangat terkait dengan peningkatan kebutuhan akan air, baik untuk domestik (air bersih) maupun

keperluan lainnya seperti, industri, pertanian, perikanan, serta kebutuhan lainnya.

Kebutuhan rata-rata air bersih setiap individu adalah sekitar 27 hingga 200 liter perhari. Kebutuhan dasar tersebut bias berbeda-beda tergantung keadaan geografis dan karakteristik individu yang bersangkutan. Namun secara keseluruhan, baku minimum kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar minum, sanitasi, mandi, dan memasak rata-rata sebanyak 50 liter perorang per hari (Gleick, 1996). Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat mengambil air dari dalam tanah, air permukaan, atau langsung dari air hujan. Dari ke tiga sumber air tersebut air tanahlah yang paling banyak digunakan karena air tanah memiliki beberapa kelebihan di banding sumber-sumber lainnya antara lain karena kualitas airnya yang lebih baik serta pengaruh akibat pencemaran yang relatif kecil (Jovita, 2002 : 1).

Sisi pasokan adalah sesuatu yang sudah harus diterima seperti apa yang telah disediakan oleh alam; serta penggunaan saling mendukung. Perencanaan juga sudah harus dapat menetapkan cara dan bagaimana pengembangan sumber daya air, operasional dan pemeliharaan, pemantauan dan pengawasan, serta usaha konservasi sumberdaya air dan lingkungan. Air tanah telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan produksi pertanian terutama pada musim kemarau di Desa Binbaru sistem irigasi sumur pompa sejak dasa warsa 80an. Mengingat sistem irigasi air permukaan sering mengalami kekurangan air pada musim kemarau, maka pengembangan air tanah tetap menjadi satu solusi untuk membantu para petani lokal mewujudkan pertanian sepanjang tahun dengan memanfaatkan sumber daya air tanah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program adalah Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Struktur Birokrasi, Faktor Disposisi Pelaksana, Intinya adalah, bahwa saat ini kebutuhan akan air dari sumber air tanah menjadi semakin kompleks tidak hanya didasarkan atas hal-hal yang bersifat teknik, tetapi mungkin justru yang paling penting adalah hal-hal yang bersifat sosial. Namun demikian tulisan ini hanya membatasi pada hal-hal yang bersifat teknik, meskipun mungkin secara sepintas menyinggung hal-hal di luar itu. Tulisan ini bermaksud menguraikan secara singkat bahwa

kebutuhan akan air meningkat ini karena Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perumahan, industri, pertanian, infrastruktur, dan lain-lain. baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta peningkatan jumlah penduduk, memberikan konsekuensi. memaksa masyarakat mencari alternatif lain yaitu mencari air yang ada di dalam tanah dengan cara membuat sumur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Sudut pandang sistem, maka implementasi adalah proses bagaimana menstranformasikan input (tujuan dan isi kebijakan) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut (*outputs dan outcomes*). Outputs adalah hasil langsung dari pengimplementasian kebijakan (*programmes performance*). Sedangkan outcomes (*impacts/ effects*) adalah dampak perubahan yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi implementasi adalah mentransformasikan tujuan kebijakan ke dalam bentuk – bentuk kegiatan operasional yang dibutuhkan agar kebijakan mencapai tujuannya. Fungsi implementasi tidak akan berubah sekalipun kebijakan yang diimplementasikan berbeda, yang berbeda adalah hasil akhirnya. Sedang tujuan implementasi itu sendiri adalah menghasilkan perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. Oleh karenanya jika dikatakan bahwa sebuah kebijakan dibuat untuk mengintervensi peri kehidupan publik, maka implementasi adalah bentuk nyata dari tindakan intervensi itu sendiri.

Kelompok-kelompok perwakilan atau kelompok-kelompok politik yang membuat / menetapkan kebijaksanaan, namun sungguh amat keliru kalau lama kita berasumsi bahwa hanya mereka semata yang membuat kebijaksanaan dan amat picik pandangan kita kalau kita menganggap bahwa administrator-administrator pada jenjang tertentu dalam organisasi sama sekali tidak membuat kebijaksanaan. Apabila mereka tidak membuat kebijaksanaan, maka mereka sebetulnya sekedar manajer-manajer. Tetapi, sepanjang mereka secara langsung atau tidak langsung, formal atau informal,

dengan cara persuasif, mengontrol informasi, atau dengan sarana apapun menetapkan keputusan-keputusan kebijaksanaan, maka mereka adalah para eksekutif atau para administrator (Solichin Abdul Wahab: 2008: 67). Kedua, berasal dari apa yang kemudian dikenal dengan sebutan pendekatan adaptif atau interaktif (khususnya dalam proyek-proyek pembangunan) dalam implementasi, yang menekankan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap tujuan dan strategi yang dilakukan oleh para aktor selama proses implementasi berlangsung, sehingga perbedaan yang tegas antara perumusan dan implementasi itu tidak lagi bermakna. Ketiga, berasal dari dua orang ahli kebijaksanaan negara yang terkemuka, Majone dan Wildavsky (Solichin Abdul Wahab: 2008: 67).

Berdasarkan pendapat Edward III (2003: 10) yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, maka definisi konseptual variabel penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Program adalah pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana. Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian: Dimensi komunikasi, Dimensi sumber daya, Dimensi struktur birokrasi dan Dimensi disposisi pelaksana.

Menurut Teori Akuntabilitas Pengelolaan Program George Edward III (2003:12-13) yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program, yaitu Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan Struktur birokrasi.

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Kebijakan dalam definisi yang mashur menurut Dye adalah *whatever government choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. (Dye dalam Indiahono, 2009: 17).

Beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Akuntabilitas Pengelolaan Program menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Berikut pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Program menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analysis, adalah: "Akuntabilitas Pengelolaan Program adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan.

Air tanah dapat diartikan sebagai sumberdaya air yang tersimpan di dalam Tanah dan tersimpan dalam lapisan yang jenuh (Freze dan Cherry, 1979 Kodoatie dan Roestam, 2005; Wahyudi, 2009). Lapisan tanah lulus air yang menyimpan dan mengalirkan air tanah disebut lapisan tanah pembawa air. Air tanah dapat bergerak secara lateral maupun vertikal yang dipengaruhi oleh keadaan morfologi, hidrologi dan keadaan geologi setempat. Pengaruh faktor geologi antara lain adalah bentuk dan penyebaran besar butir, perbedaan dan penyebaran lapisan batuan dan struktur geologi (Tushaar, 2000; Steenberg, 2002).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki 2 (dua) variabel, variabel pertama disebut sebagai variabel bebas yaitu Kebijakan pemerintah dan variabel kedua sebagai variabel terikatnya yaitu pengairan air tanah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani "Mattaneng Maccabu" yang ada di Desa Bina Baru sebanyak 35 orang. Dalam penelitian ini, penulis mengambil

secara keseluruhan populasi yang ada, yakni sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Observasi, Kuesioner, Wawancara, dan Penelitian Pustaka. Sedangkan teknik analisis data melalui Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, kuisisioner dan kepustakaan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan bantuan tabel frekuensi, dengan menggunakan skala Likert sebagai alat ukur tabel frekuensi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Data mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diambil kesimpulan bahwa 70 % konsep Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan baik. Analisis data tersebut diambil berdasarkan kumulatif dari keseluruhan konsep Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yang perhitungannya dilakukan dengan cara menjumlahkan keseluruhan jawaban responden sesuai kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah konsep yang ada.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan data tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 69,25 % konsep faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. berjalan dengan baik. Analisis data tersebut diambil berdasarkan kumulatif dari keseluruhan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang yang perhitungannya dilakukan dengan cara menjumlahkan

keseluruhan jawaban responden sesuai kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah konsep yang ada. Sehingga hasil kumulatif dari konsep faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. yaitu faktor Komunikasi 72 %, sumber daya 68 %, struktur birokrasi 70 %, disposisi pelaksana 67 %, dengan capaian 69,25 % dikategorikan baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian serta pembahasan pada bab terdahulu maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penelitian ini berada pada kategori baik.
2. Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemerintah terhadap Pengairan Air Tanah di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana, dikategorikan baik.

E. REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anonymous. (2004). *Project Justification Report – Bali Groundwater Irrigation Sub-project, DISIMP, Ministry of Settlement and Regional Infrastructures*. Jakarta: Nippon Koei Co. Ltd and Associates.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ibrahim, A. (2008). *Pokok – Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Rafika Aditama.
- Islamy, M. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Krisna, W. (2006). *Menentukan Lapisan Penyimpan Air (Akuifer) dengan Metode Geolistrik Studi Kasus di Daerah Ketep*. Kabupaten Magelang.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Jakarta : Elekmedia Komputindo.
- Pertanian, D. (2007). *Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Air Tanah Dalam, Direktorat Pengelolaan Air, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Program, P. P. (2008). *Laporan Akhir Studi Potensi Air Tanah dengan Pendugaan Geolistrik di Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Bandung, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Subarsono. (2006). *Analisa Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Akuntabilitas Pengelolaan Program Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.